

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan dari masyarakat pada pemerintahan yang baik (*good governance government*), semakin mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik di Indonesia. Akuntabilitas dari pengelolaan keuangan pemerintah adalah berupa penyusunan laporan keuangan meliputi neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Akuntabilitas finansial khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat. Sebagian besar orang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, dimana pihak-pihak pengguna laporan keuangan pemerintah antara lain : masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan pemerintah sendiri (Warsito, 2008).

Keterandalan merupakan salah satu karakter kualitas laporan keuangan daerah yang paling penting. Informasi yang diolah dan diinterpretasi dari laporan keuangan hanya akan sebegus kualitas datanya. Bila datanya dapat diandalkan maka informasinya pun menjadi berkualitas, sebaliknya bila data laporan keuangan tidak dapat diandalkan maka informasinya menjadi tidak dapat

dipercaya. Oleh karenanya, sangatlah penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan keandalan pelaporan keuangannya (Kartika dan Safitri, 2017).

Keterandalan pelaporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I : par.38) merupakan kemampuan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat didalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut tidak akan mempercayai informasi yang disajikan. Laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan melalui proses yang memberikan jaminan keterandalan penyajiannya agar berguna dalam pengambilan keputusan. Demi terselenggaranya keterandalan pelaporan keuangan yang baik, maka harus ada sumber daya manusia yang berkualitas, pemanfaatan teknologi yang baik dalam penggunaan sistem pelaporan keuangan dan pengendalian intern (Aini, 2015).

Faktor pertama yang mempengaruhi keterandalan penyusunan laporan keuangan daerah yaitu, kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kunci yang menentukan perkembangan dari organisasi. Pada hakikatnya, sumber daya manusia dalam sebuah organisasi merupakan penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut (Irawan, 2018). Sumber daya manusia yang berkualitas ditambah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat diharapkan dapat membantu dan memperlancar proses keterandalan

pelaporan keuangan daerah. Dengan demikian, laporan keuangan yang baik dan berkualitas dapat dihasilkan.

Selain kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi penting dalam mewujudkan keterandalan laporan keuangan karena semakin meningkatnya jumlah uang serta beragamnya transaksi yang dikelola. Tanpa teknologi informasi, penyiapan dan penyajian laporan keuangan daerah akan menjadi suatu proses yang lamban, tidak tepat waktu, dan kurang dapat diandalkan. Untuk itu pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi seluas mungkin (Kartika dan Safitri, 2017).

Faktor lain yang mempengaruhi keterandalan penyusunan laporan keuangan daerah adalah sistem pengendalian intern. Menurut PP No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan. Juga seluruh pegawai di lingkungan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keterandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Irawan, 2018).

Hal yang mungkin dapat mempengaruhi andalnya suatu laporan keuangan yaitu komitmen organisasi. Untuk mewujudkan keterandalan sebuah laporan keuangan pemerintah daerah tentunya seluruh pegawai harus memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Komitmen

organisasi adalah suatu tingkat kepatuhan dan keyakinan karyawan memihak pada suatu organisasi yang tujuannya untuk memelihara (Robbins, 2010:100).

Fenomena laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan hasil audit BPK Pemkab Kudus kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Opini WTP ini merupakan kali keenam yang diraih Kudus secara berturut-turut. Untuk WTP kali keenam ini, dalam menilai Kudus BPK tidak sendiri. Namun bersama Kantor Akuntan Publik (KAP). Acara penyerahan LHP ini dilangsungkan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jateng di Semarang. Kudus sebagai salah satu penerima LHP dari 26 Kabupaten/Kota di Jateng sore itu. Dan diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jateng Hery Subawa. Selain itu, ada penilaian, hak dan kewajiban, kelengkapan, dan pengungkapan. Namun Hery lebih menekankan pada pengawasan internal. Sehingga pengelolaan keuangan akan semakin baik, bukan hanya menunggu BPK.

Bupati Kudus, H Musthofa, menilai bahwa opini WTP yang diraih Kudus adalah berkat kerja keras semua OPD. Sebagai Kepala Daerah, Bupati dua periode ini berkomitmen dalam pengelolaan keuangan yang baik yang akuntabel. "Saya menyampaikan terima kasih pada seluruh OPD yang telah bekerja keras. Untuk pengelolaan keuangan dan tentunya pelayanan publik," kata Musthofa. Baginya, prinsip 4T selalu ditekankan pada semua OPD. Yakni tepat aturan, tertib administrasi, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Sehingga pengelolaan keuangan

memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas termasuk peningkatan kesejahteraan. (<http://www.suaramerdeka.com/>).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Azlan, dkk (2015) pengawasan keuangan juga mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan dalam rangka menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian diantaranya penelitian Irawan (2018), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati, dkk (2018), menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Aini (2015), menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian

intern berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari, dkk (2015), menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia, pengendalian intern, dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Azlan, dkk (2015), menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan penelitian merujuk dari penelitian Irawan (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada penambahan variabel independen yaitu pengawasan keuangan serta objek penelitian. Alasan peneliti menambahkan variabel tersebut karena pengawasan keuangan diperlukan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keterandalan pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Obyek penelitian terdahulu pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Rokan Hilir. Obyek penelitian ini pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan pernyataan diatas, penelitian ini mengambil judul :

“ PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KOMITMEN ORGANISASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Kudus)”.

1.2 Ruang Lingkup

Agar terhindar dari adanya salah tafsir terhadap maksud dan tujuan penelitian ini, maka dalam penelitian ini memiliki batasan pada beberapa masalah sehingga lebih mudah dipahami. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini :

1. Fokus penelitian ini untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, dan pengawasan keuangan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus.
2. Objek penelitian ini adalah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD di Kabupaten Kudus)

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah ?

2. Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah ?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah ?
5. Apakah pengawasan keuangan berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah
2. Untuk menganalisa apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah
3. Untuk menganalisa apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah
4. Untuk menganalisa apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah
5. Untuk menganalisa apakah pengawasan keuangan berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Organisasi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan sebagai bahan masukan dan sumber informasi dalam rangka meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kudus maupun Kabupaten lainnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi yang bermanfaat dan masukan untuk peneliti selanjutnya yang tertarik mengenai topik yang berhubungan dengan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pngendalian intern, komitmen organisasi, dan pengawasan keuangan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

